

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Urbanisasi menjadi fenomena yang kerap ditemui di daerah perkotaan. Hal ini, menurut penjelasan Harjoko dalam (Rijal & Tahir, 2022) karena urbanisasi merupakan pergerakan seseorang dari wilayah yang bukan perkotaan ke wilayah perkotaan. Proses seseorang berpindah tempat sejatinya hal yang tidak bisa dihindari. Walaupun akan menimbulkan dampak, manusia akan selalu mencari hal baru, mencari nilai baik, dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka bisa disebut bahwa perpindahan seseorang termasuk salah satu bentuknya adalah urbanisasi merupakan proses alamiah manusia (Budiayanti & Safitri, 2024).

Perkotaan menjadi tujuan urbanisasi karena wilayah kota selalu memiliki daya tarik khusus bagi beberapa lapisan masyarakat di wilayah lain. Salah satunya karena kota memiliki standarisasi sosial dan ekonomi yang memadai dan urbanisasi selalu sejalan dengan kesejahteraan dan kondisi ekonomi sebuah wilayah (Widiawaty, 2019). Lebih lanjut, wilayah pedesaan dinilai tidak memiliki potensi yang sebesar perkotaan. Pedesaan memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang maksimal jika dibanding wilayah kota (Amaya et al., 2024). Lain halnya di negara maju yang menanggapi problem tersebut dengan mengubah desa menjadi layaknya perkotaan dalam aspek perekonomian, negara berkembang seperti Indonesia masih kesulitan mengembangkan aspek ekonomi pedesaan untuk menekan laju urbanisasi (Jamaludin, 2019).

Mengacu pada data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik bahwa pada tahun 2020 diperkirakan sebanyak 56,7 persen penduduk Indonesia tinggal pada kawasan perkotaan dan akan terus meningkat hingga tahun 2035 sebanyak 66,6 persen (Rizaty, 2021). Hal ini tentunya tergolong cukup tinggi karena melebihi dari 50 persen penduduk Indonesia memilih tinggal di perkotaan. Sejalan dengan hal itu, pada tahun 2022 dalam laporan BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia di perkotaan berada di angka 155.523.750 jiwa sedangkan di pedesaan hanya sebanyak 120.250.024 jiwa (Pusat Statistik, 2024).

Urbanisasi ke perkotaan lambat laun akan menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial di wilayah tersebut baik berupa hal yang positif ataupun negatif. Dalam konteks positif, urbanisasi menyuguhkan peluang untuk peningkatan sektor ekonomi dan kemudahan mobilitas serta keterjangkauan layanan publik karena penduduk yang padat akan memerlukan hal-hal tersebut. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh urbanisasi salah satunya adalah berubahnya tata guna lahan (Amaya et al., 2024).

Lahan yang menjadi korban akibat adanya urbanisasi adalah lahan yang berkemungkinan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi ketika dialihfungsikan. Salah satu lahan yang rawan akibat hal ini adalah lahan basah pertanian seperti sawah untuk diubah dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk yang semakin padat (Puspitaningrum, 2024). Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat sawah sebagai lahan penghasil sumber pangan utama masyarakat Indonesia sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan pangan. Dengan diubahnya lahan sawah dalam kurun waktu beberapa tahun ini akan secara langsung mengancam persediaan pangan (Solihah, 2024).

Kota yang menjadi tujuan urbanisasi sudah seharusnya memenuhi syarat sebagai kota yang kuat adalah kota yang bagaimanapun adanya penduduk di wilayah tersebut, kebutuhan para penduduknya harus bisa terpenuhi salah satunya adalah kebutuhan pangan (Abdurrohman et al., 2021). Kepadatan penduduk tersebut selain mengakibatkan menipisnya produksi pangan namun juga memunculkan lahan-lahan terbengkalai yang kumuh atau disebut lahan kritis. Lahan kritis menurut Poerwowidodo (1992) dalam (Sersermudi et al., 2022) adalah lahan yang terbuka ataupun tertutup oleh semak belukar yang diakibatkan oleh menipisnya solum tanah kemudian ditandai dengan munculnya bebatuan ke permukaan karena mengalami erosi dan rendahnya produktivitas.

Dalam laporan Badan Pusat Statistik (Pusat Statistik, 2024), Provinsi Jawa Barat menjadi menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan jumlah penduduk di perkotaan sebanyak 38.266.077 jiwa. Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam (Rajul, 2023) memiliki jumlah penduduk pendatang per

Maret 2023 sekitar 4.200 jiwa dan sebanyak 1.500 pendatang tercatat sebagai penduduk nontetap atau sementara. Hal ini tentu dipicu oleh faktor tertentu, salah satunya ialah faktor perekonomian. Pembangunan perkotaan khususnya pertumbuhan ekonomi yang cepat menjadikan Kota Bandung sebagai kota urbanisasi yang digemari (Fauzi & Abdullah, 2024). Hal ini dilihat dari jumlah persentase pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun 2023 berada di angka 5,07 persen (Pusat Statistik, 2024).

Dengan jumlah penduduk yang padat dan masuk dalam kategori kota dengan urbanisasi yang tinggi, maka Kota Bandung berada dalam bayang-bayang kebutuhan pangan dan lahan kritis. Hal ini bisa dilihat dari data yang dipaparkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung periode 2013-2018 bahwa pasokan pangan sebanyak 96% berasal dari luar daerah (Kamila, 2018). Dalam permasalahan lahan kritis, dilansir oleh *Open Data Jabar* 2025 Kota Bandung pada 2020 tercatat memiliki sebanyak 837.42 hektare dengan status sangat kritis (Dinas Kehutanan, 2022).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam mengusahakan ketahanan pangan dan pengelolaan lahan kritis di tengah urbanisasi di perkotaan adalah dengan sistem *urban farming*. Hal ini karena *urban farming* atau pertanian perkotaan memiliki peluang besar dalam membantu menghadapi krisis pangan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) bahwa *urban farming* telah menyumbang 15-20 persen pasokan pangan global. Dengan begitu pertanian perkotaan bisa menjadi opsi dalam memenuhi kebutuhan dari bidang pangan di perkotaan (Setiawan & Pratama, 2024). Hal ini didukung oleh data yang dipaparkan oleh RUAF *foundation* dalam (Setiawan & Pratama, 2024) bahwa program *urban farming* yang telah dilakukan di kota-kota besar Dunia seperti Shanghai telah berhasil menyediakan 90 persen kebutuhan konsumsi sayuran segar bagi masyarakat sekitar. *Urban farming* diartikan sebagai sebuah strategi dalam rangka menghasilkan bahan makanan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan perkotaan dan bisa memangkas proses distribusi pangan walaupun dalam lahan yang terbatas (Anggrayni et al., 2017).

Urban farming memiliki peluang untuk berkontribusi dalam menangani lahan kritis walaupun sebagian pelakunya mengharapkan dampak ekonomi dengan menjual hasil dari *urban farming* yang mereka lakukan, atau hanya sekadar membantu pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga saja (Septya et al., 2022). Namun sejatinya salah satu manfaat *urban farming* selain berkaitan dengan permasalahan pemenuhan pangan di perkotaan adalah bahwa *urban farming* dapat menyelamatkan lingkungan dengan pengolahan sampah serta penduduk kota dapat memenuhi pangannya dengan mudah termasuk kesediaan bahan makanan segar (Sulistyowati & Ilhami, 2018).

Pelaksanaan *urban farming* yang diproyeksikan untuk dilakukan di perkotaan nyatanya masih banyak mengalami kendala. Menurut penuturan informan bahwa setiap jenis program, konsistensi adalah hal yang sulit dicapai. Akan ada masa ketika kontribusi anggota yang naik turun. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat bahwa Bandung sebagai kota yang padat memiliki 224 Usaha Pertanian Perorangan *Urban Farming* (unit) pada 2023 (BPS Jabar, 2024). Sedangkan dalam penuturan informan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, dalam satu tahun pihaknya rutin membangun dan membantu pengadaan 100 kelompok *urban farming* baru. Dengan ketimpangan angka yang mencerminkan daya tahan sebuah kelompok tani dalam menjalankan *urban farming* masih tergolong rendah. Aspek-aspek semacam penguatan jejaring yang ada pada masyarakat agar pada akhirnya bersedia bekerja sama menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan program. Jejaring-jejaring di masyarakat dalam konteks sosial dengan kasat mata membantu memenuhi kebutuhan kolektif *Urban farming* sebagai sebuah gerakan tentu memerlukan jejaring sosial dalam mencapai keberhasilan. Hal ini karena *urban farming* sebagai sebuah gerakan akan sangat terbantu dengan jejaring yang ada (Sudarmono, 2021).

Modal sosial bisa dipahami sebagai sebuah konsep yang memiliki hubungan erat dengan proses interaksi antar anggota kelompok berupa kepercayaan, jaringan, dan norma yang pada akhirnya diarahkan untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan penuturan Putnam (2000) dalam (Kamila,

2018) bahwa modal sosial adalah kepercayaan, norma, dan jaringan dalam sebuah organisasi sosial yang bisa membantu efisiensi masyarakat dengan mengkoordinir mereka. Hal ini didasari karena bagi Putnam bahwa hubungan antar individu akan menghasilkan jaringan sosial, hubungan timbal balik, dan kepercayaan. Lebih lanjut, Putnam (1996) dalam (Sudarmono, 2021) menganggap bahwa dasar hubungan antar individu tersebut bisa memberikan kesempatan bagi partisipasi kegiatan untuk secara efektif bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

Kehidupan masyarakat pertanian modal sosial adalah hal yang harus ada (Sudarmono, 2021). Hal ini dikarenakan modal sosial akan menciptakan kepedulian antar anggota kelompok tapi dalam menyelesaikan masalah dan bertahan. Sehingga jika melihat pemaparan di atas maka modal sosial adalah hal yang penting dalam pelaksanaan *urban farming*. Tanpa modal sosial, masyarakat akan lebih sulit dalam mencapai tujuan, tidak memiliki orang terpercaya dalam menjalankan program, dan tidak memiliki jejaring. Hal-hal tersebut akan menghambat efektivitas program itu sendiri terlebih *urban farming* bergerak pada masyarakat perkotaan dengan karakternya tersendiri.

Permasalahan yang terdapat di Kota Bandung akibat padatnya penduduk berdasarkan sumber-sumber yang dipaparkan diantaranya adalah ketersediaan pangan dan munculnya lahan kritis yang terbengkalai. Salah satu solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan diadakannya program *urban farming* karena mampu menghasilkan pangan mandiri dan mengubah lahan kritis menjadi produktif. Namun program *urban farming* di Kota Bandung jumlahnya masih rendah dibanding target semestinya. Salah satu program *urban farming* yang masih berjalan di Kota Bandung dan menyandang predikat sebagai kelompok *urban farming* terbaik se-Kota Bandung pada 2024 adalah *urban farming* yang dilakukan oleh Kelompok Tani Bima Mandiri di RW 10 Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung. Dalam penuturan informan, Kelompok Tani Bima Mandiri rutin melakukan proses pertanian dan peternakan setiap hari di kawasan yang terpusat sejak 2020 silam. Sehingga kehadiran Kelompok Tani Bima

Mandiri menarik dan perlu diteliti agar diketahui seperti apa modal sosial yang mereka miliki sehingga membuat kelompoknya tetap bertahan hingga kini.

B. Rumusan Masalah

Pemaparan latar belakang masalah pada poin sebelumnya memunculkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program *urban farming* Kelompok Tani Bima Mandiri di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung?
2. Modal sosial apa yang terdapat dalam Kelompok Tani Bima Mandiri di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang telah diungkapkan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui program *urban farming* yang terdapat pada Kelompok Tani Bima Mandiri di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung.
2. Mengetahui dan memaparkan modal sosial yang terdapat dalam Kelompok Tani Bima Mandiri di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan tidak hanya untuk kepentingan pribadi peneliti namun juga diharapkan memiliki kegunaan yang lebih luas diantaranya sebagai berikut:

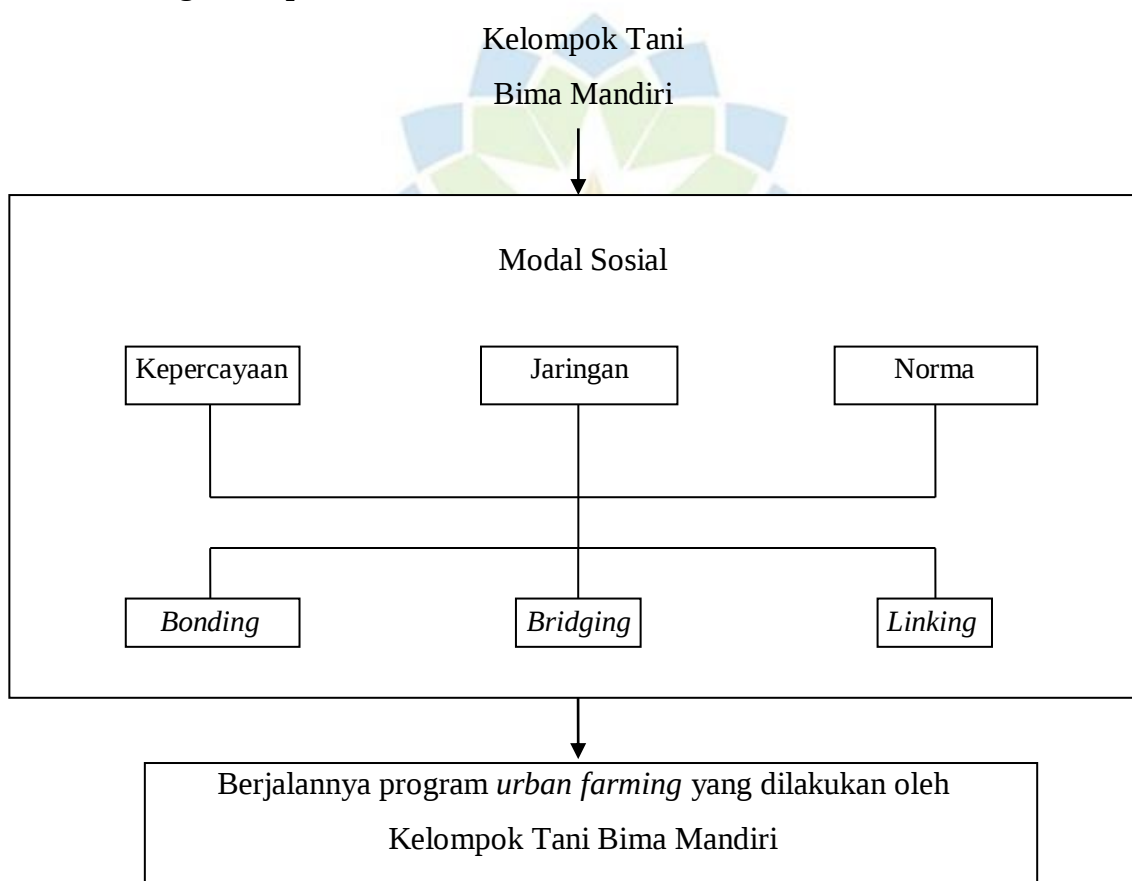
1. Kegunaan Ilmiah

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, dapat memberikan sumbangsih dalam memperkuat atau menguji ulang teori mengenai modal sosial. Selain itu, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman bahwa modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma tidak hanya konsep yang abstrak namun dapat terlihat berperan nyata dalam ketahanan sebuah kelompok di masyarakat salah satunya yakni kelompok tani di perkotaan dalam melakukan program *urban farming*.

2. Kegunaan Praktik

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan saran dan rekomendasi bagi kelompok tani lainnya mengenai pelaksanaan program *urban farming* oleh masyarakat perkotaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan pihak yang terlibat dalam mengelola kelompok tani atau program *urban farming* mengenai pentingnya kehadiran modal sosial dalam program pemberdayaan terkhususnya program *urban farming* di kemudian hari.

E. Kerangka Berpikir



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

Gambaran kerangka berpikir menunjukkan bahwa penelitian ini akan berusaha melihat bagaimanakah modal sosial dalam program *urban farming* di Kelompok Tani Bima Mandiri Kelurahan Cisaranten Bina Harapan yang terlihat

dari proses interaksi yang dimiliki oleh anggota mampu membantu proses berjalannya program *urban farming*.

Modal sosial merupakan sumber daya yang berbentuk kepercayaan, jaringan, dan norma. Ketiga aspek tersebut jika ditelusuri lebih jauh akan ditemukan dalam tiga konstruk pengukuran modal sosial yakni *bonding*, *bridging*, dan *linking*. Program *urban farming* dapat didorong keberhasilan pelaksanaannya dengan modal sosial yang ditopang oleh beberapa aspek tersebut.

Proses interaksi antar anggota kelompok merupakan jalan awal dalam melihat modal sosial yang ada pada Kelompok Tani Bima Mandiri Kelurahan Cisaranten Bina Harapan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk melihat bagaimana modal sosial yang berada pada kelompok bisa dimaksimalkan sehingga memiliki dampak untuk Kelompok Tani Bima Mandiri dalam menjalankan program *urban farming* hingga saat ini.

